JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KANTOR DESA SUNGAI PANDAN HULU KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rizki Nur Wahyu[1], Siti Raudah[2], Barkatullah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: rizkiwahyu2104@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara mandiri dan terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten/kota, sehingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu terkomputerisasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun demikian, penerapan Siskeudes di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti proses implementasi yang kompleks, keterbatasan fasilitas pendukung, minimnya keterampilan aparat, serta kurangnya pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Siskeudes di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis implementasi kebijakan melalui empat variabel teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap dua belas informan yang dipilih secara purposive sampling, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan uji kredibilitas berupa perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes secara umum sudah berjalan namun belum optimal: variabel komunikasi pada indikator sosialisasi, kejelasan, dan konsistensi informasi tergolong belum merata; variabel sumber daya pada indikator fasilitas masih terbatas, sedangkan keterampilan dan pelatihan aparat belum menyeluruh; variabel disposisi menunjukkan komitmen dan sikap kerja aparat yang tergolong baik meski belum didukung insentif khusus; dan variabel struktur birokrasi pada indikator SOP dan fragmentasi tugas sudah berjalan cukup baik meski belum sepenuhnya terdokumentasi secara tertulis. Faktor pendukung utama adalah kerja sama dan komitmen antarperangkat desa, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan fasilitas dan keterampilan sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan fasilitas kerja, pelatihan berkelanjutan, penguatan sosialisasi, serta penyusunan SOP tertulis.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, sistem keuangan desa, siskeudes, keuangan desa.

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 concerning Villages mandates that village financial management be carried out independently and separately from district/city government finance, prompting the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), together with the Directorate General of Village Governance, to develop the Village Financial System Application (Siskeudes) as a computerized tool for planning, budgeting, implementation, administration, reporting, and accountability of village finance. However, the application of Siskeudes at the Sungai Pandan Hulu Village Office, Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency, still faces various obstacles, such as a complex implementation process, limited supporting facilities, insufficient staff skills, and a lack of training. This study aims to examine the implementation of Siskeudes at the Sungai Pandan Hulu Village Office along with the factors influencing its implementation. The study employs a descriptive qualitative approach, analyzing policy implementation through George C. Edward III's four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving twelve informants selected through purposive sampling, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing/verification, with credibility tests consisting of extended observation, increased persistence, triangulation, negative case analysis, use of reference materials, and member checking. The findings show that Siskeudes implementation has generally been running but is not yet optimal: the communication variable, covering outreach, clarity, and consistency of information, is still uneven; the resources variable shows limited facilities, while staff skills and training remain incomplete; the disposition variable shows good staff commitment and work attitude despite the absence of specific incentives; and the bureaucratic-structure variable, covering standard operating procedures and task fragmentation, has run reasonably well although not yet fully documented in writing. The main supporting factor is cooperation and commitment among village officials, while the main inhibiting factors are limited facilities and human-resource skills. The study recommends improving work facilities, continuous training, stronger outreach, and the preparation of written standard operating procedures.

Keywords: *policy implementation, village financial system, siskeudes, village finance.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan pemerintah desa dilaksanakan secara terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola, mencatat, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa yang mandiri tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

dan disiplin anggaran. Desa memiliki berbagai sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, meliputi Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, hibah, serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran, agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran, yang dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, dan setelah pelaksanaannya berakhir wajib disusun Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan efisien, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sistem informasi yang membantu pemerintah desa melaksanakan seluruh proses pengelolaan keuangan desa secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kehadiran Siskeudes diharapkan mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan ketepatan penyusunan laporan keuangan, serta memperkuat sistem pengendalian internal. Tampilan aplikasi ini dirancang sederhana dan sistematis, mencakup fitur input anggaran, rencana kerja, dan perubahan anggaran pada tahap perencanaan; transaksi keuangan, pembukuan, dan monitoring pada tahap pelaksanaan; pencatatan aset, pengelolaan utang piutang, dan rekonsiliasi keuangan pada tahap penatausahaan; serta laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban, dan analisis keuangan pada tahap pelaporan.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan Siskeudes pada kantor-kantor desa di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk di Desa Sungai Pandan Hulu, masih menghadapi berbagai kendala, antara lain proses implementasi aplikasi yang kompleks dan memerlukan waktu lama, ketergantungan pada teknologi yang belum sepenuhnya tersedia atau stabil, serta perlunya perubahan perilaku dan budaya kerja aparatur dalam menggunakan sistem berbasis komputer. Kondisi ini menyebabkan penerapan Siskeudes menjadi kurang efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan desa, dan diperburuk oleh kurangnya keterlibatan stakeholder seperti masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses implementasinya.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Observasi awal peneliti menemukan sedikitnya tiga permasalahan pokok pada Kantor Desa Sungai Pandan Hulu. Pertama, kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer, jaringan internet, dan printer, yang menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan desa sehingga menyulitkan pengambilan keputusan. Kedua, kurangnya keterampilan dan pengetahuan aparat desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes, yang berdampak pada seringnya kesalahan input data keuangan. Ketiga, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, yang menyebabkan aparat kesulitan menjalankan tugas pengelolaan keuangan secara mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2016:136), yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Siskeudes beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, dengan manfaat teoretis bagi pengembangan ilmu administrasi publik di bidang kebijakan publik, dan manfaat praktis sebagai masukan bagi aparat dan masyarakat Desa Sungai Pandan Hulu serta acuan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran atau uraian secara sistematis, cermat, dan faktual mengenai fenomena implementasi kebijakan yang ditemukan di lapangan, tanpa mengukur atau mengkuantifikasi data yang diperoleh. Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lain yang relevan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap dua belas orang yang dinilai paling memahami permasalahan penelitian, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Rif'ad	Kepala Desa	1 Org
2	Syarifuddin, S.Sos	Sekretaris Desa	1 Org
3	Novita Agustina	Kepala Urusan Perencanaan	1 Org
4	Khairiyanti	Kepala Urusan Keuangan	1 Org
5	Jayadi, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan	1 Org
6	Rahmat	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	1 Org
7	Mahdalina	Staf	1 Org
8	Mahdiannor	Ketua RT.001	1 Org

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

9	Muhammad Ali Yusni	Ketua RT.002	1 Org
10	Gt. Rony Fitriadi	Ketua RT.004	1 Org
11	Sarah	Badan Permusyawaratan Desa	1 Org
12	Fauzan	Badan Permusyawaratan Desa	1 Org

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi terhadap perilaku dan kondisi lapangan, wawancara mendalam kepada informan terkait, serta dokumentasi berupa foto kegiatan, arsip, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), yaitu reduksi data (penyederhanaan dan pemilahan data yang relevan), penyajian data (penyusunan data secara sistematis agar mudah dipahami), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka analisis penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III (dalam Agustino, 2016:136), yang dijabarkan ke dalam empat variabel beserta indikatornya, yaitu (1) komunikasi dengan indikator sosialisasi, kejelasan, dan konsistensi; (2) sumber daya dengan indikator fasilitas, keterampilan, dan pelatihan; (3) disposisi dengan indikator pengangkatan birokrasi dan insentif; serta (4) struktur birokrasi dengan indikator SOP dan fragmentasi.

Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas menurut Sugiyono (2015), yaitu memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber data, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi berupa foto dan rekaman wawancara, serta mengadakan membercheck kepada informan untuk mengonfirmasi kesesuaian data dan informasi yang telah dikumpulkan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dari tiga belas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah 915,05 Km² yang sebagian besar berupa daratan rendah bergambut dengan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut, dan jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 237,05 ribu jiwa. Kecamatan Sungai Pandan, tempat penelitian ini dilaksanakan, terdiri dari 33 desa dengan luas wilayah 59,92 Km². Desa Sungai Pandan Hulu merupakan entitas pemerintahan desa yang terbagi menjadi enam Rukun Tetangga (RT), didukung oleh berbagai organisasi kemasyarakatan aktif seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, dan Posyandu, yang turut berperan dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

1. Komunikasi

Variabel komunikasi dalam penelitian ini dijabarkan melalui tiga indikator, yaitu sosialisasi, kejelasan informasi, dan konsistensi penyampaian informasi, yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Siskeudes.

a. Sosialisasi

Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa sosialisasi Siskeudes telah dilaksanakan oleh pihak kecamatan bersama pendamping desa, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya menjangkau seluruh aparat desa karena keterbatasan waktu dan kesibukan sebagian staf. Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan juga menyampaikan bahwa materi sosialisasi masih bersifat umum dan belum disertai sesi praktik yang memadai, sehingga sebagian aparat merasa kebingungan ketika mulai mengoperasikan aplikasi. Hasil observasi memperkuat temuan ini, yakni sosialisasi cenderung dilakukan pada awal penerapan Siskeudes tanpa jadwal berkala, dan pesertanya umumnya hanya perangkat inti seperti sekretaris dan bendahara desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, indikator sosialisasi tergolong belum sepenuhnya efektif, karena belum mencakup seluruh aparat desa dan belum dilaksanakan secara rutin, meskipun antusiasme aparat desa menunjukkan adanya komitmen untuk beradaptasi dengan sistem baru ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya sesuai dengan teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), yang menegaskan bahwa komunikasi yang baik dan merata akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula.

b. Kejelasan Informasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai penggunaan Siskeudes telah disampaikan kepada aparat desa, namun sebagian informan menilai penjelasannya masih terlalu umum dan menginginkan penjelasan yang lebih rinci mengenai tata cara input data, penyusunan laporan, dan penggunaan kode rekening. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa informasi terkait pembaruan sistem tidak selalu disampaikan secara serentak kepada seluruh perangkat, sehingga sebagian staf mengetahui pembaruan tersebut dari rekan kerja, bukan dari pendamping desa, yang menyebabkan perbedaan pemahaman antarperangkat.

Dengan demikian, kejelasan informasi dalam pelaksanaan Siskeudes masih perlu ditingkatkan, karena penyampaian informasi yang tidak seragam menyebabkan perbedaan interpretasi antarperangkat desa. Berdasarkan teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), komunikasi yang efektif harus jelas dan mudah dipahami, sehingga kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sub-variabel ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori tersebut.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

c. Konsistensi Penyampaian Informasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai pembaruan sistem Siskeudes belum disampaikan secara rutin, melainkan hanya pada saat ada kegiatan dari kecamatan, sehingga beberapa perangkat tidak mengetahui perubahan terbaru. Hasil observasi juga menunjukkan belum adanya mekanisme komunikasi internal yang terstruktur, karena informasi penting sering disampaikan secara lisan tanpa dokumentasi resmi, sehingga staf yang tidak hadir dalam rapat berpotensi kehilangan informasi penting.

Berdasarkan temuan tersebut, penyampaian informasi belum konsisten karena tidak ada mekanisme komunikasi rutin yang terjadwal. Menurut teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), konsistensi komunikasi sangat penting agar pelaksana memahami kebijakan secara seragam, sehingga sub-variabel ini belum sesuai dengan teori tersebut karena komunikasi masih bersifat sporadis dan belum terjadwal secara berkala.

2. Sumber Daya

a. Fasilitas

Hasil wawancara dan observasi secara konsisten menunjukkan bahwa fasilitas pendukung Siskeudes, seperti komputer, printer, dan jaringan internet, sudah tersedia namun jumlahnya masih terbatas, sehingga beberapa staf harus menggunakan perangkat secara bergantian. Kantor desa hanya memiliki satu komputer utama untuk administrasi dan keuangan, sementara kondisi jaringan internet belum stabil sehingga menghambat proses pelaporan. Beberapa informan menuturkan bahwa perangkat komputer yang digunakan sering mengalami gangguan teknis, seperti sistem yang berjalan lambat, aplikasi yang tidak responsif, serta gangguan atau error saat pengolahan data berlangsung.

Dengan demikian, fasilitas kerja di Desa Sungai Pandan Hulu belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan Siskeudes secara maksimal. Berdasarkan teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), sumber daya yang memadai merupakan syarat utama keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga sub-variabel fasilitas ini belum sesuai dengan teori tersebut karena sarana dan prasarana masih terbatas.

b. Keterampilan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan Siskeudes sudah cukup baik, namun masih ada staf yang belum memahami fitur-fitur aplikasi secara menyeluruh dan membutuhkan bantuan operator utama saat menginput data. Beberapa informan, termasuk perwakilan Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RT, menyampaikan bahwa kemampuan dasar komputer sebagian staf masih minim serta terdapat kesenjangan kemampuan antarperangkat yang memengaruhi kecepatan pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, keterampilan aparat desa sudah meningkat namun belum merata di seluruh bidang kerja. Menurut teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), sumber daya manusia yang terampil menentukan efektivitas

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

implementasi, sehingga sub-variabel keterampilan ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori tersebut karena masih terdapat pelaksana yang kesulitan menjalankan tugas berbasis digital.

c. Pelatihan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan Siskeudes telah dilaksanakan oleh kecamatan dan pendamping desa, namun belum rutin dilakukan setiap tahun dan masih bersifat dasar, belum mencakup metode berbasis praktik maupun simulasi kasus nyata yang sering terjadi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan tidak mencakup semua bidang kerja secara merata.

Dengan demikian, kegiatan pelatihan sudah berjalan namun perlu dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh staf memiliki kemampuan yang setara. Berdasarkan teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), sumber daya manusia perlu dibekali pelatihan berkelanjutan, sehingga sub-variabel pelatihan ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori tersebut karena pelaksanaannya belum merata dan belum rutin.

3. Disposisi

a. Pengangkatan Birokrasi (Komitmen dan Sikap Pelaksana)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat desa menunjukkan sikap positif dan tanggung jawab tinggi dalam menjalankan Siskeudes, dengan sistem birokrasi yang telah diterapkan secara menyeluruh dinilai sudah mendukung pelaksanaan program pembangunan desa secara efektif dan efisien. Hasil observasi memperkuat temuan ini, yakni perangkat desa melaksanakan tugas dengan disiplin dan menunjukkan koordinasi yang baik antarbagian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksana kebijakan sudah memiliki komitmen dan sikap positif terhadap penerapan Siskeudes. Menurut teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), disposisi yang baik dari pelaksana akan mendukung keberhasilan implementasi, sehingga sub-variabel ini telah sesuai dengan teori tersebut karena aparat menunjukkan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

b. Insentif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum ada insentif khusus bagi aparat desa pelaksana Siskeudes, namun semangat kerja aparat tetap tinggi, dengan etika kerja yang baik menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa staf tetap bekerja secara disiplin meskipun tanpa penghargaan tambahan.

Dengan demikian, pelaksana kebijakan tetap menunjukkan motivasi kerja yang tinggi meski tanpa insentif khusus. Berdasarkan teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), insentif berfungsi untuk meningkatkan motivasi pelaksana, sehingga sub-variabel ini telah

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

sesuai secara moral dengan teori tersebut karena semangat kerja aparat tetap tinggi walau tanpa penghargaan finansial.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa SOP pelaksanaan Siskeudes sudah digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa, dengan keberadaan SOP dinilai menciptakan keteraturan dan mengurangi potensi kesalahan kerja. Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat temuan ini, yakni setiap kegiatan pencatatan dan pelaporan mengikuti prosedur sesuai pedoman kerja yang telah disahkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan SOP telah berjalan baik dan membantu ketertiban administrasi keuangan desa. Menurut teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), struktur birokrasi yang teratur akan meningkatkan efektivitas kebijakan, sehingga sub-variabel SOP ini telah sesuai dengan teori tersebut karena pedoman kerja digunakan secara konsisten.

b. Fragmentasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembagian tugas antarperangkat desa sudah jelas dan dijalankan sesuai tanggung jawab masing-masing, dengan pembagian kerja yang rinci dan koordinasi yang baik dinilai meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa koordinasi antarbagian berjalan lancar tanpa tumpang tindih pekerjaan.

Dengan demikian, pembagian kerja antarperangkat desa sudah berjalan efektif dan sesuai tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), fragmentasi yang jelas memperkuat efektivitas implementasi kebijakan, sehingga sub-variabel ini telah sesuai dengan teori tersebut karena koordinasi dan pembagian tanggung jawab berjalan dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) di kantor desa sungai pandan hulu kecamatan sungai pandan kabupaten hulu sungai utara

Faktor Pendukung

a. Kerja Sama yang Baik antar Perangkat Desa

Hasil wawancara dengan berbagai informan, mulai dari Kepala Desa hingga Ketua RT dan Badan Permusyawaratan Desa, secara konsisten menunjukkan bahwa kerja sama antarperangkat desa dalam pelaksanaan Siskeudes sudah berjalan sangat baik. Setiap bagian saling membantu dan berkoordinasi melalui rapat internal untuk memastikan laporan keuangan tersusun tepat waktu, sinkronisasi data perencanaan dan keuangan berjalan lancar, serta setiap kendala teknis dapat diselesaikan bersama tanpa harus menunggu instruksi. Hasil observasi memperkuat temuan ini, yakni terlihat adanya

koordinasi aktif antarbagian dalam penyusunan laporan keuangan, mulai dari pengumpulan data, verifikasi informasi, hingga penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan teori Edward III (dalam Agustino, 2016:136), kerja sama yang baik antarperangkat desa sesuai dengan aspek komunikasi dan disposisi, karena koordinasi yang efektif memperkuat implementasi kebijakan, sementara sikap positif dan komitmen dari pelaksana kebijakan mendorong mereka untuk mengatasi setiap tantangan yang muncul selama proses implementasi Siskeudes.

b. Komitmen dan Tanggung Jawab Aparat Desa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh aparat desa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan Siskeudes, ditunjukkan melalui disiplin kerja, kesadaran menjalankan tugas, serta kesungguhan dan kemandirian dalam menyelesaikan laporan keuangan. Komitmen ini menjadi faktor pendukung penting yang memastikan program Siskeudes tetap berjalan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya.

Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Fasilitas Pendukung

Hasil wawancara menunjukkan bahwa fasilitas seperti komputer dan printer di kantor desa masih terbatas, sehingga proses pelaporan dan penginputan data ke Siskeudes sering mengalami keterlambatan, pekerjaan menumpuk, dan menghambat kelancaran administrasi keuangan desa secara keseluruhan. Beberapa informan menambahkan bahwa komputer yang digunakan sering mengalami gangguan teknis, seperti hang dan lambat merespons, sementara jaringan internet yang tidak stabil sering mengharuskan pengulangan proses pengiriman data.

b. Keterampilan Aparat Desa yang Belum Merata

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keterampilan aparat desa dalam mengoperasikan Siskeudes masih belum merata dan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan administrasi keuangan desa. Staf desa masih mengalami kesulitan dalam input data dan pelaporan keuangan karena kurangnya pelatihan dan pendampingan yang diberikan, sehingga kurangnya pelatihan yang merata dan kemampuan yang belum berkembang secara optimal menjadi faktor penghambat utama keberhasilan implementasi Siskeudes. Menurut teori Edward III, aspek sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan, sehingga ketimpangan kemampuan staf desa perlu segera diatasi agar pelaksanaan sistem berjalan lebih efektif dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum telah berjalan namun belum optimal. Aplikasi ini sudah digunakan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, tetapi pemanfaatannya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi. Pada variabel komunikasi, indikator sosialisasi, kejelasan, dan konsistensi penyampaian informasi masih belum merata dan belum terjadwal secara berkala. Pada variabel sumber daya, indikator fasilitas masih terbatas, sedangkan keterampilan dan pelatihan aparat sudah meningkat namun belum menyeluruh. Pada variabel disposisi, aparat desa menunjukkan komitmen dan sikap kerja yang baik meskipun belum didukung insentif khusus. Pada variabel struktur birokrasi, indikator SOP dan fragmentasi tugas sudah berjalan cukup baik karena pedoman kerja digunakan secara konsisten dan pembagian tanggung jawab antarperangkat sudah jelas.

Faktor pendukung implementasi Siskeudes adalah kerja sama yang baik antarperangkat desa serta komitmen dan tanggung jawab tinggi dari aparat desa, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan fasilitas pendukung seperti komputer, printer, dan jaringan internet, serta keterampilan aparat desa dalam mengoperasikan Siskeudes yang belum merata akibat pelatihan yang belum menyeluruh. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Siskeudes di Desa Sungai Pandan Hulu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, kemampuan sumber daya manusia, kelancaran komunikasi, serta pengaturan organisasi, sehingga perbaikan pada aspek-aspek tersebut dibutuhkan agar Siskeudes dapat berjalan lebih baik dan mendukung pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: pertama, kepada Kepala Desa Sungai Pandan Hulu agar meningkatkan penyediaan fasilitas kerja seperti komputer dan jaringan internet supaya proses pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih lancar; kedua, kepada seluruh aparat desa agar mengikuti pelatihan yang diadakan secara berkelanjutan sehingga kemampuan mengoperasikan Siskeudes dapat meningkat dan tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang operator; dan ketiga, kepada masyarakat Desa Sungai Pandan Hulu agar lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa, terutama dengan memanfaatkan kemudahan akses informasi yang disediakan melalui Siskeudes.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Bandung: CV Jejak.

Handoko, T. Hani. (2013). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu S.P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Kadir, A. (2014). Pengenalan Sistem Informasi (Edisi ke-2). Yogyakarta: Andi.

Radjab, E., & Jam'an, A. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rivai, Veithzal. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rudianto. (2013). Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Jakarta: Erlangga.

Sedarmayanti. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.

Siagian, Sondang P. (2015). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. (2012). Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: LP3ES.

Van Meter, Donald S., & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.

Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.